

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao adalah penyelenggara urusan pemerintah bidang kebijakan perhubungan atau transportasi untuk wilayah Kabupaten Rote Ndao. adapun fungsi Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya .kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. karna fungsinya yang strategis bidang perhubungan ,Dishub juga menyiapkan SDM sedini mungkin dengan sekolah- sekolah binaan bidang transportasi saeperti sekolah tinggi transportasi darat(STTD) dan lainnya. melalui dinas Perhubungan ini juga aturan terkait transportasi dimusim – musim padat seperti mudik hari raya diatur.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Profil Dinas Perhubungan kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Untuk menjadi dasar bagi Dinas dalam melaksanakan kebijakan dan pembangunan sektor perhubungan serta pengembangan SDM Perhubungan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana hasil yang telah dicapai dan untuk selanjutnya dijadikan landasan dalam menerapkan strategi pembangunan dalam bidang perhubungan.
3. Untuk mengetahui kinerja Dinas Perhubungan pada tahun Anggaran 2021

C. Sejarah singkat OPD

Kabupaten Rote Ndao berdiri pada tahun 2002.pada waktu itu Dinas Perhubungan masih bernama Dinas Perhubungan dan Pariwisata.pada tahun 2006 Dinas Perhubungan Berubah nama sesuai nomenklatur menjadi Dinas Perhubungan pisah dengan Dinas Pariwiata sampai tahun 2014.Namun pada tahun 2014 pertengahan berubah nama menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)sampai tahun 2017.pada tahun 2018 kembali menjadi Dinas Perhubungan sampai sekarang.

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Visi dan Misi Kabupaten Rote Ndao

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rote Ndao dijabarkan dalam Visi Kabupaten Rote Ndao yaitu ***Terwujudnya Rote Ndao Yang Bermartabat Secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang di Dukung oleh Pertanian dan Perikanan***” telah ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao sebagai bentuk dukungan sesuai dengan tupoksinya dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi yang di maksud.

Misi untuk mewujudkan Visi Pembangunan tersebut adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya saing;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui sektor Pariwisata yang didukung Oleh Pertanian dan Perikanan;
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan,Infrastruktur, Penataan Ruang , dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima;

Dinas Perhubungan sebagai OPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan. Dikaitkan dengan Visi Misi Bupati /Wakil Bupati Rote Ndao dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 -2024 serta Urusan pemerintahan yang diselenggarakan. maka fungsi Dinas Perhubungan terkait dengan pencapaian Misi **3** yaitu :***“Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan”***. dengan ketersediaan jalan dan jembatan, sarana pengairan, drainase, jaringan listrik, dermaga, Bandar Udara, Pelabuhan rakyat, perluasan cakupan pelayanan air bersih dan bantuan rumah rakyat dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao mendukung agenda tersebut dengan : program yang berkaitan dengan urusan perhubungan

B. Tugas dan Fungsi

- a) Kedudukan Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao
 1. Dinas Merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan
 2. Dinas di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- b) Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao.

Merumuskan Kebijakan Teknis serta menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Perhubungan meliputi kesekretariatan, perhubungan darat, perhubungan laut dan udara, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perhubungan/transportasi yang handal, unggul dan bersaing serta mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao
- c) Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang perhubungan;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang perhubungan;
 4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Rote Ndao;

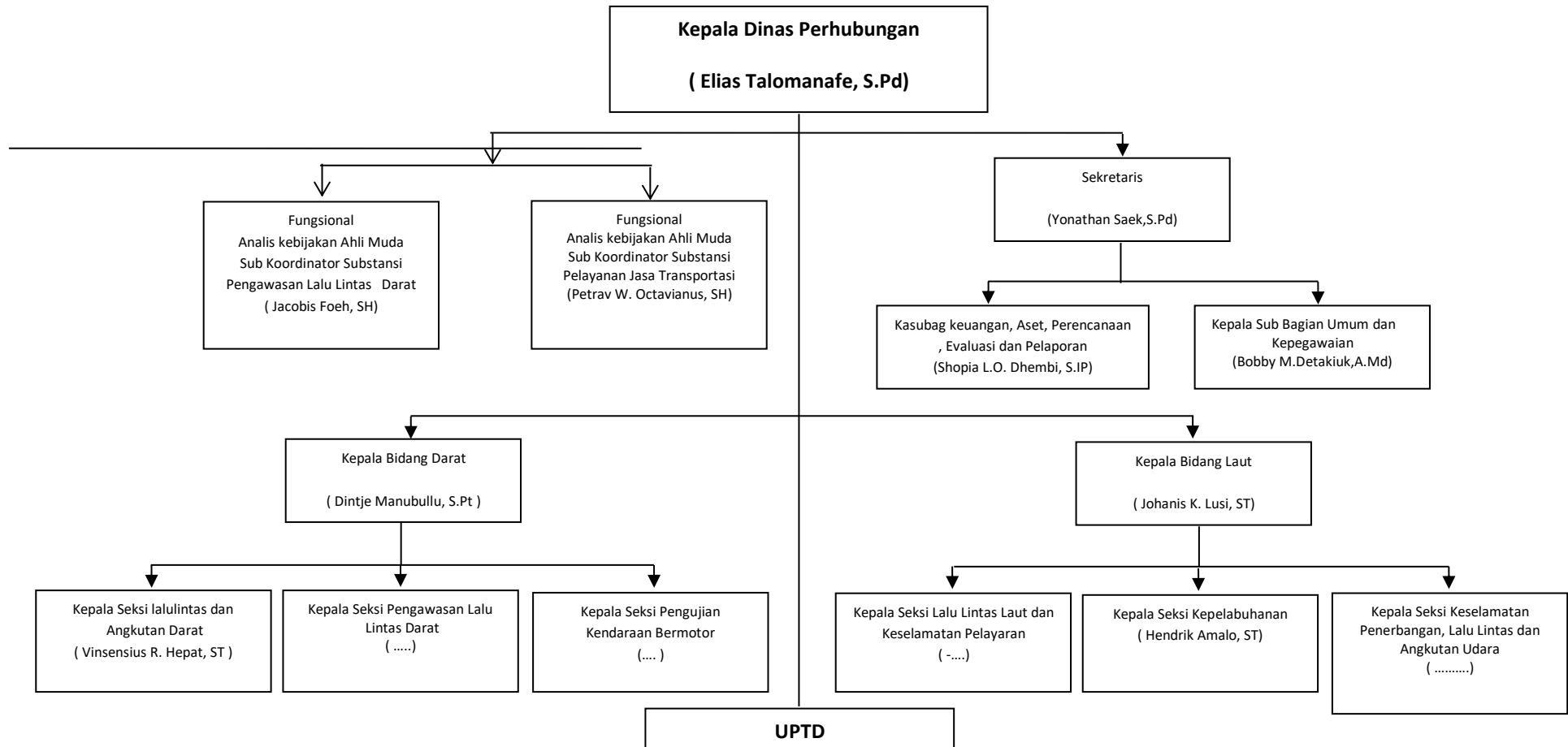
C. Struktur Organisasi (dijelaskan)

Berdasarkan Perda Nomor 03 tahun 2016, tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Rote Ndao dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 10/KEP/HK/2011 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas –dinas di Daerah maka struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao dapat diuraikan sebagai berikut

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretaris
 - Sub bagian Umum Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan
- c) Bidang Perhubungan Darat terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
 - Seksi Lalu Lintas dan angkutan Darat
 - Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pengawasan Lalu Lintas Darat)

- d) Bidang Perhubungan Laut dan Udara terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu:
- Seksi Lalu Lintas Laut dan Keselamatan Pelayaran
 - Seksi Seksi Kepelabuhanan, Navigasi dan Radio Pantai
 - Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Analis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Substansi Pelayanan Jasa Transportasi)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROTE NDAO



D. Sumber Daya Modal / ASSET

Sumber daya modal / aset pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao meliputi:

1. Prasarana gedung meliputi:
 - Gedung Kantor Dinas : 1 Unit
 - Gedung Aula : 1 Unit
 - Gedung Pengujian : 2 Unit
 - Gedung Terminal : 3 Unit
 - Gudang Terminal : 2 Unit
2. Sarana operasional meliputi:
 - Kendaraan roda 4 dan 6 : 13 (tigabelas) unit
 - Kendaraan roda 2 : 15 (lima belas) unit
 - Komputer : 5 (lima) unit
 - Printer : 5 (lima) unit
 - Laptop : 8 (delapan) unit
 - Air conditioner (AC) : 6 (enam) unit
 - GPS : 1 (satu) unit
 - Peralatan pengujian : 3 (dua) paket
 - Proyektor : 1 (unit)
 - Kapal viber : 2 (dua) unit
 - Kapal Kayu : 2 (dua) unit
 - Speed boot : 2 (dua) unit
3. Sarana dan Prasarana pendukung meliputi:
 - Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail) 246M
 - Rambu Peringatan 10 (sepuluh) Buah
 - Rambu Penunjuk Arah 801 (delapan ratus satu) Buah
 - Rambu Larangan 33 buah
 - Marka Jalan 100 meter
 - Traffick Light 4 (Empat) Unit

BAB. III PEMBAHASAN

A. ADMINISTRASI

1. Renstra

Dinas Perhubungan sebagai OPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan. Dikaitkan dengan Visi Misi Bupati /Wakil Bupati Rote Ndao dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 -2024 serta Urusan pemerintahan yang diselenggarakan

Pencapaian Misi **3** yaitu :“**Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan**”. dengan ketersediaan jalan dan jembatan, sarana pengairan, drainase, jaringan listrik, dermaga, Bandar Udara, Pelabuhan rakyat, perluasan cakupan pelayanan air bersih dan bantuan rumah rakyat dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao mendukung agenda tersebut.

Berdasarkan misi dan faktor-faktor keberhasilan maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2019-2024) dapat dilihat pada tabel yang tertera di bawah ini

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan dan sasaran	Indicator tujuan dan sasaran	Target kinerja pada tahun ke -				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkanya kualitas sarana dan prasarana Perhubungan	1.Jumlah uji KIR angkutan umum	297	487	677	867	1057
		2.Penyediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan kabupaten	40,44	40,44	44,44	48,44	52,44

2. Renja

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Dinas Perhubungan. Renja juga sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Kinerja Pemerintah.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan serta hasil rencana program kegiatan

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
- b. Tujuan yang dikehendaki.
- c. Sasaran-sasaran prioritas yang mewujutkan.
- d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.

Disamping itu penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020 dan perkiraan pencapaian tahun 2021 sebagai bahan (entry point) dalam penyusunan perencanaan tahun 2022.
- Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

3. Rencana Kinerja Tahunan

RANCANA KINERJA TAHUNAN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN : 2022

Tabel.3.2 Rencana Kinerja Tahunan

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Perhubungan.	1.1 Penyediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan kabupaten.	44,44%
		1.2 Jumlah uji KIR angkutan umum.	677 Unit

4. Standar Operasional Prosedur

Maksud ditetapkannya Standart Operasional Prosedur adalah sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan dalam mengidentifikasi, merumuskan, mengatur, memonitor, mengevaluasi serta mengembangkan SOP – AP dalam penyelenggaraan pemerintahan baik penyelenggaraan internal maupun eksternal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Tujuan ditetapkannya standar Operasional Prosedur adalah:

1. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan.
3. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.
4. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipukul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
5. Membantu penelusuran terhadap kesalahan kesalahan prosedur dalam memberikan pelayanan.
6. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi waktu maupun prosedur
7. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.
8. Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. TRANSPARANSI KEUANGAN

1. Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA / DPA).

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tabel 3.3 Rencana Kerja/Dokumen pelaksanaan Anggaran

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
		Jumlah Rp	Jumlah Rp
4.	Pendapatan Daerah		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp.333.877.000	Rp.333.877.000
	Retribusi Daerah	Rp.333.877.000	Rp.333.877.000
	Jumlah Pendapatan	Rp.333.877.000	Rp.333.877.000
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.754.545.000	1.754.545.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.049.528.250	1.206.607.250
5.2	Belanja Modal	29.684.500	29.684.500
5.2.02	Belanja Modal peralatan dan Mesin	29.684.500	29.684.500
	Jumlah Belanja	Rp.2.833.757.750	Rp.2.990.836.750
	Total Surplus(Defisit)	(Rp.2.499.880.750	(Rp.2.656.959.750)

2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran

- a. Capaian Pelaksanaan Program sesuai dengan Target Kinerja Yang ditetapkan dalam perjanjian Kinerja

Tabe 3.4 LKPJ

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Perhubungan	1. Penyediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan kabupaten	40,44 %	40,44 %
		2. Jumlah uji KIR angkutan umum	487 unit	395 unit

- b. Realisasi Anggaran

Perangkat Dinas perhubungan Kabupaten Rote Ndao mendapat alokasi sebesar Rp. 2.990.836.750,- dengan realisasi sebesar Rp.2.741.650.459,- atau 91,67 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 249.186.291,-

3. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah LLPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).

4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021. LKIP ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2021.

Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel.3.5 Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Perhubungan	Penyediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan kabupaten	100	Sangat Tinggi
	Jumlah uji KIR angkutan umum	100	Sangat Tinggi
CAPAIAN KINERJA (Rata-Rata)		100	Sangat Tinggi

5. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja kunci outcome Rasio di jalan kabupaten

Tabel 3.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	IKK outcome	IKK output	Rumus	Perhitungan			Capaian kinerja (%)	Sumber data
1.	Rasio di jalan kabupaten	Prosentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten di bagi target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten di kali 100	831	x	100	40,44	Bid. Darat
				2054				

6. Laporan Keuangan.

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao mendapatkan Alokasi Anggaran dan Belanja Daerah Sesuai Perda No. 6 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 dan Perubahannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun 2021 dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	Jumlah		Sisa Anggaran	
	Anggaran	Realisasi	(Rp)	%
PENDAPATAN	333,877,000	150,264,500	183,612,500	45.01
PENDAPATAN ASLI DAERAH	333,877,000	150,264,500	183,612,500	45.01
BELANJA DAERAH	2,990,836,750	2,741,650,459	249,186,291	91.67
Belanja Operasi	2,961,152,250	2,711,965,959	249,186,291	91.58
Belanja Pegawai	1,754,545,000	1,518,842,429	235,702,571	86.57
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN			-	
	1,535,185,000	1,300,782,429	234,402,571	84.73
Belanja tambahan Penghasilan	159,000,000	157,700,000	1,300,000	99.18
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	60,360,000	60,360,000	0	100.00
Belanja Barang Jasa	1,206,607,250	1,193,123,530	13,483,720	98.88
Belanja Barang	334,932,250	334,927,307	4,943	100.00
Belanja Jasa	599,792,000	586,313,223	13,478,777	97.75
Belanja Pemeliharaan	9,960,000	9,960,000	0	100.00
Belanja Perjalanan Dinas	261,923,000	261,923,000	0	100.00
Belanja Modal	29,684,500	29,684,500	0	0.00
SURPLUS /DEFISIT	-2,656,959,750	-2.591.385.959	-65,573,791	2.53

Tahun Anggaran 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao Mendapatkan alokasi pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.333.877.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dengan realisasinya sebesar Rp.150.264.500,- atau 45,01 %, dengan rincian:

A. Retribusi Jasa Umum :

1. Retribusi pelayanan parker tepi jalan umum, jumlah anggaran Rp.134.292.000,- realisasi Rp.102.000.000,- atau 75,95 %.

B. Retribusi Jasa Usaha :

1. Retribusi tempat khusus parkir anggaran Rp.56.800.000 realisasi Rp.19.300.000,- atau 33,98%
2. Retribusi pelayanan kepelabuhan jumlah anggaran Rp.142.785.000,- realisasi Rp.29.464.500,- atau 20,64 %.

Belanja Daerah.

Belanja Daerah Dinas perhubungan kabupaten Rote Ndao pada Tahun 2021 sebesar Rp.1.381.993.650,- dengan 3 Program dan 9 kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp.20.000.000,- realisasi Rp.20.000.000,- atau 100 %,
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp.10.000.000,- realisasi Rp.10.000.000,- atau 100 %,
- 2) Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran sebesar Rp.1.694.185.000,- realisasi Rp.1.458.482.429,- atau 86%,
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD anggaran sebesar Rp.114.584.000 realisasi Rp.114.584.000 atau 100 %
- 3) Kegiatan Administrasi barang milik daerah dengan sub kegiatan :
 - a. Pengaman barang Milik daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- realisasi Rp.15.000.000 atau 100%,
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - a. pendataan dan pengelola administrasi kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp.390.000.000,- realisasi Rp.390.000.000,- atau 100 %.
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi listrik dengan anggaran sebesar Rp.1.358.800,- realisasi Rp.1.358.800,- atau 100 %.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran sebesar Rp.29.684.500,- realisasi Rp.29.684.500,- atau 100 %.
 - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan anggaran sebesar Rp.10.000.000,- realisasi Rp.10.000.000,- atau 100%.
 - d. Penyediaan Bahan Materil anggaran sebesar Rp.34.999.450,- realisasi Rp.34.999.361,- atau 100 %.
 - e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD anggaran sebesar Rp.194.833.000,- realisasi Rp.194.833.000,- atau 100 %.
- 6) Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah dengan sub kegiatan:
- a. Penyediaan Jasa Surat menyurat anggaran sebesar Rp.2.014.000,- realisasi Rp.2.013.000,- atau 100 %.
 - b. Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air listrik dan internet anggaran sebesar Rp. 40.998.000,- realisasi Rp.37.962.533,- atau %.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran Rp.393.170.000,- realisasi Rp.382.722.836,- atau 100 %.
 - b. Pemeliharaan Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran Rp.5.000.000,- realisasi Rp.5.000.000,- atau 100 %.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) :

- 1) Kegiatan pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Sub Kegiatan :
- a. Pemeliharaan sarana dan Prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor.
 - b. Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pegujian berkala kendaraan bermotor dengan anggaran Rp.25.000.000,- realisasi rp.25.000.000,-atau 100 %.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

- 1) Kegiatan pembangunan penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan local dengan sub kegiatan:
 - a. Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan Lokal dengan anggaran Rp.10.000.000,- realisasi Rp.10.000.000,- atau 100%

C. INOVASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao mempunyai planning untuk menciptakan suatu inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan di bidang transportasi, yaitu inovasi Layanan Enteng Transportasi Sekolah (LENTERA-SKA) berbasis aplikasi.

Inovasi ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dikalangan pelajar di Kabupaten Rote Ndao dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dikalangan pelajar ini, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao mencoba membuat inovasi layanan khususnya di bidang transportasi.

Tujuan diciptakannya inovasi ini adalah untuk mendeskripsikan inovasi Layanan Enteng Transportasi Sekolah (LENTERA-SKA).

Seiring dengan bertambahnya pengguna internet yang semakin meningkat, maka Pemerintah sudah selakryaknya menciptakan inovasi-inovasi terkait layanan berbasis teknologi dengan memanfaatkan internet.

Untuk sementara ini Inovasi LENTERA-SKA pada Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao di dukung oleh 2 (dua) unit Armada Bus Sekolah dan selanjutnya Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao akan bekerja sama dengan Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) Kabupaten Rote Ndao agar menambah jumlah armada bus sekolah guna mendukung Inovasi yang dimaksud.

BAB. IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

1. Belum optimalnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran Transportasi: Masalah tersebut disebabkan oleh belum tercapainya target standar pelayanan minimal untuk Penyediaan Perlengkapan jalan, Pertumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat cukup pesat , rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalulintas dan kerusakan jalan akibat pelanggaran tonase.
2. Belum Optimalnya Kualitas layanan angkutan; Masalah tersebut disebabkan oleh rendahnya load factor angkutan umum ,ketrepaduanjaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi jalan antar moda relative rendah, belum optimalnya ketersediaan dan fungsi prasarana pengujian dan terminal. Infrastruktur yang belum memadai, hal ini ditandai dengan kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur atau prasarana,baik infrastuktur fisik (yang merujuk kepada jaringan jalan dan bandara) maupuninfrastuktur non fisik atau (pasokan listrik ,kesejahteraan social dan kesehatan).
3. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan; Masih terdapat titik-titik jalan dimana seharusnya ditempatkan fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu, baik rambu peringatan, rambu larangan dan rambu penunjuk jalan belum terpasang dan juga terdapat ruas jalan yang beresiko bahaya yang membutuhkan pagar pengaman jalan ada yang belum terpasang.
4. Jumlah armada angkutan umum sangat terbatas terutama di wilayah pedesaan; Hal ini dikarenakan masih kurangnya minat dan kemampuan masyarakat untuk melakukan usaha jasa angkutan umum.
5. Belum tersedianya peralatan keselamatan pelayaran pada kapal rakyat yang melakukan pelayaran antar pulau di wilayah kabupaten Rote Ndao; Dan ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran para pemilik kapal untuk melengkapi kapalnya dengan peralatan keselamatan pelayaran terutama baju pelampung,untuk itu diperlukan sosialisasi tentang ketentuan dan persyatan keselamatan pelayaran kepada para pemilik kapal.
6. Belum memadainya sarana dan prasarana laut antara lain: armada dan sarana komunikasi.

7. Teknologi sarana dan prasarana Bandara masih di bawah standart atau tidak memadai.
8. Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar wilayah dan intra wilayah.
9. Belum tersusunnya dokumen tataran transportasi wilayah dan lokasi (tatralok).
10. Peningkatan panjang Runway / fasilitas bandara masih terkendala pembebasan lahan : Upaya pembebasan tanah untuk perpanjangan landasan pacu bandara pernah mengalami kegagalan karena tidak terdapat kesepakatan antara para pemilik tanah dengan pemerintah sehingga kedepan perlu dilakukan pendekatan yang lebih intensif secara kekeluargaan dengan mempertimbangkan 18arker keadilan sehingga adanya rasa puas baik oleh pihak pemilik tanah maupun pihak pemerintah.
11. Masih terbatasnya pengembangan Sumber daya Manusia
12. Masih rendahnya realisasi pencapaian PAD satker Perhubungan; Hal ini dikarenakan belum tersedianya sarana pendukung sumber pendapatan seperti tempat 18arker khusus di tempat umum serta masih kurangnya tenaga penagih retribusi.

BAB. V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
TAHUN 2022

1. Program penunjang Urusan Pemerintahan

A. Prpgram Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp.20.000.000
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran sebesar Rp.10.000.000,-
2. Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,-
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD anggaran sebesar Rp.114.590.000,-
3. Kegiatan Administrasi barang milik daerah dengan sub kegiatan :
 - Pengaman barang Milik daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000,-
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - pendataan dan pengelola administrasi kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp.390.000.000,- realisasi Rp.390.000.000,- atau 100 %.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangakat Daerah dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi listrik dengan anggaran sebesar Rp.2.000.000,-
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan anggaran sebesar Rp.14.999.800,-.
 - Penyediaan Bahan Logistig anggaran sebesar Rp.34.998.700,- .
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD anggaran sebesar Rp.207.310.000,- .
6. Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat menyurat anggaran sebesar Rp.2.006.000,-.

- Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air listrik dan internet anggaran sebesar Rp. 40.998.000,-.
- 7. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan jasa pemeliharaan ,biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran Rp.130.927.000,-

2. Program Kegiatan Bidang

- A. (Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ)
 - 1. Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :
 - penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.147.606.500,- .
 - 2. Kegiatan pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Sub Kegiatan :
 - Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pegujian berkala kendaraan bermotor dengan anggaran Rp.15.000.000,-
 - 3. Kegiatan Pengelolaan terminal tipe C` dengan Sub Kegiatan :
 - Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung dengan anggaran sebesar Rp. 215.000.000,-.
- B. Program Pengelolaan Pelayaran
 - 1. Kegiatan pembangunan penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan local dengan sub kegiatan:
 - Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan Lokal dengan anggaran Rp.10.000.000,-.

BAB.VI

PENUTUP

1. Kesimpulan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao harus mampu mewujudkan suatu system transportasi yang tertib, lancar dan aman. Maka untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao harus dapat menyediakan jasa transportasi yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sektor lain yang akan berfungsi menggerakkan dinamika pembangunan kabupaten Rote Ndao yang maju dan terdepan Visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao. Menetapkan misi adalah upaya yang dilakukan sebagai tahapan pencapaian visi, sehingga hal-hal yang terlihat abstrak dalam visi akan lebih nyata dan dapat dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan.

2. Saran

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao.

Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao adalah:

1. Meningkatkan keselamatan transportasi.
2. Meningkatkan keamanan transportasi.
3. Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi.
4. Memenuhi SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai kebutuhan.

Ba'a; 06 juni 2022
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Rote Ndao

Elias Talomanafe, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19660413 198903 1 012